

## Demokrasi, Dominasi Kekuasaan Oligarkis dan Perlawanan Masyarakat Warga

---

Arsenius Nega<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
Pos-el/Phone number: arseniusnega@gmail.com

**Diajukan:** Maret, 2024; **Direview:** April, 2024; **Diterima:** Juni 11, 2024; **Dipublish:** Juni, 2024

---

**Abstract :** Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa proses demokrasi di Indonesia telah lama didominasi oleh kekuasaan oligarkis. Kendati demokrasi formal terbentuk dan berjalan hingga kini, tetapi secara substansial yang terjadi sesungguhnya adalah praktik kekuasaan dari segelintir orang kuat. Pendekatan yang digunakan penulis adalah metode kualitatif-deskriptif dengan membaca literatur terkait topik yang dibahas. Dari kajian ini disimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami disorientasi, karena sesungguhnya yang berkuasa adalah para oligark. Sesungguhnya, oligarki ini telah mengkooptasi ruang publik, mengintervensi media, memberangus oposisi, memperlemah suara kritis masyarakat warga dan menjinakkan intelektualisme serta merampas kebebasan akademik kampus. Realitas semacam ini memberi ruang bagi kekuasaan oligarkis untuk memonopoli kebenaran dengan mengklaim kebenaran yang dapat memenuhi kepentingan parsial semata. Atau dengan kata lain, kebenaran hanya sekadar sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Ada secercah harapan yang dapat menjadi salah satu opsi solutif berhadapan dengan dominasi kekuasaan oligarkis adalah memproposalkan perlawanan yang sungguh menempatkan rakyat sebagai *demos* yang berdaulat. Perjuangan mulia itu mesti dilengkapi juga dengan upaya terus-menerus mencari kebenaran yang pada gilirannya ikut memandu jalannya demokrasi.

**Key words:** Demokrasi, Kekuasaan Oligarkis, Monopoli Kebenaran, Masyarakat Warga, Mencari Kebenaran

### Pendahuluan

Dalam artikel yang berjudul *Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion*, Eve Warburton dan Edward Aspinall menyatakan bahwa Reformasi telah terjadi pada tahun 1998 tetapi bangsa Indonesia mewarisi struktur politik oligarkis dari Era Orde Baru.<sup>1</sup> Alih-alih membawa angin segar dan transformasi berarti, Reformasi justru hanya menjadi cita-cita dan peluang bagi penguasa menghancurkan demokrasi secara lebih terbuka dan sistematis. Parahnya lagi, tidak ada kekuatan-kekuatan progresif yang bisa menggantikannya dan bebas dari kendali oligarki. Kelompok elit lama yang berkonspirasi dengan rezim Soeharto selama Orde Baru hanya mengubah dirinya dengan membuat partai-partai politik.<sup>2</sup> Ideologi partai yang semuanya memuat komitmen seolah-olah berdiri bersama dan memperjuangkan kepentingan rakyat, tetap tinggal sebagai cita-cita tanpa tindakan nyata. Politik pun lebih dilihat sebagai instrumen untuk memperoleh kekuasaan. Jelaslah bahwa hingga kini

---

<sup>1</sup> Eve Warburton dan Edward Aspinall, "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion", *Contemporary Southeast Asia*, 41, 2019, hlm. 261.

<sup>2</sup> F. Budi Hardiman, *Dalam Moncong Oligarki, Skandal Demokrasi di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013), hlm. 24-26.

sistem politik Indonesia dicengkram oleh oligarki, yang pada gilirannya membentuk kekuasaan oligarkis. Ini berarti, kekuasaan dikendalikan sedikit orang kuat—para pemilik modal, tetapi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan. Jeffrey Winters menyebutnya sebagai oligarki-elektoral-berkuasa, di mana menjadi oligark sangat berkait-kelindan dengan kemungkinan menjadi penguasa di pemerintahan.<sup>3</sup> Para pemilik modal ini bersekutu dengan penguasa atau bahkan menduduki jabatan birokrasi dan menghalalkan segala cara guna melanggengkan kekuasaan. Hal ini ditandai dengan menguatnya dominasi kekuasaan material dalam percaturan politik, jurang antara orang kaya dan orang miskin semakin besar, lemahnya partisipasi rakyat dalam mengontrol dan mengendalikan sistem politik, kooptasi media massa, dan adanya kolonisasi pasar dalam sistem politik.<sup>4</sup> Dalam berbagai cara, kekuasaan oligarkis ini berupaya mempertahankan *status quo* dan menundukkan salah satu preferensi demokrasi, yakni masyarakat warga.

Melalui kekuasaan oligarkis ini, rezim bisa sebebannya mendesain kebijakan yang melayani kepentingannya, menjalankannya secara otoriter dan feodalistik serentak mengabaikan kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, rezim memiliki kuasa memonopoli kebenaran dengan klaim atas kebenaran, penyebaran hoaks secara masif dan menjadikan kebenaran itu sendiri hanya sekadar sebagai komoditas. Pada tataran ini, kebenaran yang diklaim rezim itu didesign untuk memihak kepada kepentingan dan demi kepentingannya sendiri. Hannah Arendt melihat bahwa klaim kebenaran merupakan hambatan bagi diskusi, membungkam kebebasan berpendapat dan turut mendukung matinya demokrasi. Di dalamnya tidak terdapat deliberasi tentang kebenaran. Yang ada hanyalah monopoli atas kebenaran yang berpijak di atas dogma “*the king can do no wrong*”.<sup>5</sup> Akibatnya, kebohongan dan propaganda yang diproduksi pemerintah secara masif lebih mudah dipercayai masyarakat sebagai kebenaran. Berkenaan dengan itu, tidak dapat diharapkan terbentuknya sistem politik demokrasi yang sehat di tengah kuatnya rezim mengkooptasi gerakan kritis warga dan mengklaim kebenarannya sendiri. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa sebenarnya kemunduran demokrasi adalah proyek elit, yang perlahan tetapi pasti menyebabkan ambruknya keadaban publik sebagai fondasi bangsa.

Studi terdahulu mengenai dominasi oligarki di Indonesia pernah diteliti dan ditulis oleh F. Budi Hardiman dengan judul buku *Dalam Moncong Oligarki: Skandal Demokrasi di Indonesia*. Melalui buku tersebut, Hardiman menegaskan bahwa oligarki merupakan masalah mendasar yang menghancurkan demokrasi Indonesia dari dalam. Menurutnya, demokrasi justru memfasilitasi oligarki untuk terus berkembang hingga saat ini dalam konstelasi politik Indonesia.<sup>6</sup> Berhadapan dengan dominasi kekuasaan oligarkis, Hardiman menekankan tentang pentingnya penguatan masyarakat warga yang menentukan perjalanan demokrasi ke arah yang lebih baik. Studi terdahulu lainnya pernah dikerjakan oleh Ferdinandus Jehalut dengan judul artikel *Oligarki dan Paradoks Demokrasi di Indonesia*. Penelitian ini mengetengahkan tentang paradoks demokrasi yang memungkinkan bertumbuh suburnya oligarki. Jehalut membuktikan bahwa ketika demokrasi telah terjebak ke dalam oligarki, sejumlah paradoks lain akan

<sup>3</sup> Jeffrey A. Winters, “Oligarki dan Demokrasi di Indonesia”, dalam AE Priyono dan Usman Hamid (ed.), *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 222.

<sup>4</sup> Ferdinandus Jehalut, “Oligarki dan Paradoks Demokrasi di Indonesia”, *Akademika*, Vol. 14, No. 1, Agustus-Desember 2018, hlm. 20.

<sup>5</sup> Otto Gusti Madung, “Demokrasi dan Kebenaran”, dalam Wijayanto, dkk (eds.), *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia* (Depok: LP3ES, 2021), hlm. 889.

<sup>6</sup> F. Budi Hardiman, *op.cit.*, hlm. 30.

muncul dengan sendirinya. Dalam karyanya, Jehalut menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk melumpuhkan oligarki ialah memperkuat masyarakat warga dan membentuk kekuatan-kekuatan kiri.

Penulis juga sepakat dengan kajian Hardiman dan Jehalut yang melihat oligarki sebagai masalah yang menghancurkan demokrasi dari dalam dan harus segera dilawan oleh masyarakat warga. Dalam karya ini, penulis akan menerangkan bahwa kekuasaan oligarkis tersebut pada akhirnya bisa sebebannya memonopoli dan mengkalim kebenaran serta berupaya memproduksi aneka kebohongan di ruang publik. Kebohongan yang disebarkan secara masif dapat terwujud dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Persoalan tentang monopoli kebenaran ini luput dari perhatian Hardiman dan Jehalut dalam karya mereka. Tentu penting untuk melawan oligarki melalui penguatan masyarakat warga dan gerakan-gerakan sosial yang terorganisasi secara sistematis. Namun, lebih jauh dari itu, masyarakat warga tidak boleh terperjara dalam kubangan monopoli kebenaran penguasa. Masyarakat warga juga harus menjadi pejuang dan pencari kebenaran yang pada gilirannya ikut memandu jalannya proses demokrasi. Dengan itu, masyarakat warga ikut memberi kontribusi bagi kembalinya demokrasi, berseminya keadaban publik dan merawat kewarasan bernegara.

Melalui karya ini, penulis akan menguraikan tentang demokrasi Indonesia yang didominasi oleh kekuasaan oligarkis. Berhadapan dengan kenyataan ini, penting untuk menggerakkan perlawanan masyarakat warga dan upaya terus-menerus mencari kebenaran. Untuk maksud dan tujuan tersebut, dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui penelitian kepustakaan. Penulis membaca sumber-sumber penting yang berkaitan dengan tema demokrasi dan kekuasaan oligarkis di Indonesia, didukung dengan penelitian-penelitian terakhir. Tulisan ini dipertajam dan dilengkapi dengan diskursus terkini dan data-data terpercaya tentang situasi politik Indonesia dari lembaga pejuang demokrasi, khususnya LP3ES.

### **Dominasi Kekuasaan Oligarkis di Indonesia**

Sistem demokrasi yang diraih pascarezim Orde Baru semestinya menjadi arena bagi setiap warga negara untuk mewujudkan kedaulatan mereka dalam kehidupan politik dan ekonomi. Namun, alih-alih berdaulat, proses demokrasi sepenuhnya dikendalikan oleh berbagai kekuatan oligarkis. Ironinya, para penyelenggara negara lebih memilih bersekutu dengan para oligarkis ketika mengawal bangsa, memuliakan konstitusi, dan menjaga hati nurani rakyat.<sup>7</sup> Akibatnya, demokrasi formal memang terbentuk, tetapi secara substansial yang terjadi sesungguhnya adalah “demokrasi kaum penjahat”.<sup>8</sup> Keberadaan para politisi yang berselingkuh dengan pemodal atau para pemodal yang menjadi politisi adalah penampakan yang sangat biasa dalam konstelasi politik di Indonesia. Tentang ini, Jeffrey Winters menulis:

Para oligark merupakan aktor-aktor yang sangat berkuasa dalam ekonomi-politik Indonesia, bahwa mereka sudah cukup berpengaruh selama masa Orde Baru, dan bahwa transisi menuju demokrasi sama sekali bukanlah gangguan bagi atau penyusutan atas kekuasaan mereka. Oligarki sendiri memang berubah secara dramatis bersamaan dengan jatuhnya Soeharto-dari bentuk sultanistik ke bentuk di mana mereka menjadi penguasa-dengan konsekuensi-konsekuensi penting menyangkut

---

<sup>7</sup> Syamsuddin Haris, *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), hlm. xi.

<sup>8</sup> R. William Liddle, “Pengantar: Mengukir Demokrasi Indonesia”, dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (ed.), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 18.

bagaimana pembelaan atas kekayaan diupayakan dan dijamin di Indonesia. Oligarki berubah setelah Soeharto, tetapi ia tidaklah lenyap.<sup>9</sup>

Ini berarti, hingga kini pihak yang berkuasa dan mengendalikan sistem politik Indonesia tetaplah oligarki. Para presiden terpilih secara demokratis justru memunggungi demokrasi dengan cara mengayomi para pemilik modal yang juga haus kuasa. Perlahan tetapi pasti watak rezim menjadi lebih ganas dan otoriter dengan lebih terbuka. Pemimpin lebih terlihat populis dan mengusung program-program pro rakyat, tetapi justru memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu, yang didahulukan dalam proses politik adalah kepentingan para pemegang kekuasaan, pengusaha dan partai politik. Di sini, kekuasaan sering jatuh dalam tipu muslihat dan godaan kapitalis yang mengabaikan kepentingan rakyat. Oligarki yang semakin terkonsolidasi itu pun mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan dan selalu dioperasikan secara sistemik.<sup>10</sup> Elitisme kekuasaan yang terutama termanifestasi dalam kekuasaan kaum oligark sesungguhnya menghambat dan merongrong praksis demokrasi kita. Ia adalah patologi yang menggerogoti dan menghancurkan demokrasi. Proses penghancuran ruang publik demokrasi oleh kekuasaan oligarkis itu nyata dalam fenomena-fenomena memprihatinkan berikut ini.

*Pertama*, instrumentalisasi media massa. Salah satu komponen strategis bagi para oligark yang secara politik ambisius pastilah akan melibatkan kontrol media. Pemilik media yang adalah oligark itu, berada dalam posisi mempengaruhi isi media dan mengerahkan pengaruh yang mengakibatkan pembatasan kebebasan jurnalistik.<sup>11</sup> Dengan itu, mereka telah memperlemah fungsi media sebagai anjing penjaga demokrasi. Jurgen Habermas sebagaimana dikutip Hardiman, ruang publik tidak lagi menjadi arena diskursus bagi masyarakat warga, melainkan panggung representasi diri para elit media yang menjadi kaki tangan kepentingan-kepentingan pasar dan kekuasaan.<sup>12</sup> Media tidak lagi menjadi fasilitas diskursus rasional, tetapi berubah menjadi komoditas yang melayani kepentingan oligarki. Atau dengan kata lain, muncul media-media oligarkis yang tidak lagi menjalankan tugas mulia menyampaikan kebenaran. Media justru berubah menjadi wahana penyebar hoaks dan kebohongan yang telah didesain kekuasaan oligarkis, cenderung mendominasi, menguasai, mengarahkan pikiran publik dan merekonstruksi realitas.<sup>13</sup> Media-media akhirnya tunduk pada kepentingan-kepentingan pihak berkuasa dan tidak memiliki taring untuk barangkali sedikit mengusik kenyamanan penguasa yang pongah. Karena tunduknya media pada kuasa kapitalis, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam demokrasi yang berhak atas informasi dan kritik atas demokrasi itu juga digiring pada ketergantungan dan kompulsivitas audiens.<sup>14</sup> Jadi opini-opini di ruang publik diproduksi berdasarkan kemauan rezim. Ruang-ruang kritis

<sup>9</sup> Jeffrey A. Winters, *op.cit.*, hlm. 209.

<sup>10</sup> Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, penerj. Zia Anshor (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.

<sup>11</sup> Ignatius Haryanto, "Monopoli Media dan Runtuhnya Independensi Jurnalistik", dalam AE Priyono dan Usman Hamid (ed.), *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 698.

<sup>12</sup> F. Budi Hardiman, "Komersialisasi Ruang Publik Menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas", dalam F. Budi Hardiman, *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hlm. 196.

<sup>13</sup> Eduardus Dosi, *Media Massa dalam Jaring Kekuasaan: Sebuah Studi tentang Relasi Kekuasaan di Balik Wacana* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2012), hlm. 17.

<sup>14</sup> Anno Susabun, "Politik Demokrasi Kapitalistik dan Bahaya Instrumentalisasi Media Massa", *Biduk* Edisi I. LXX. Juli-Desember 2016, hlm. 25

dibatasi bahkan dibasmi agar ekspansi pengaruh kekuasaan semakin melebar. Pada akhirnya ruang publik dan keseluruhan proses demokrasi tidak lebih dari pada arena pertukaran komoditas politis.

Praktik otoriter kekuasaan oligarkis yang semakin terkonsolidasi tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di ruang-ruang digital. Hal ini ditandai dengan adanya penetrasi pasukan siber Pemerintah ke dalam ruang diskusi digital untuk menekan opini dari pihak yang berlawanan.<sup>15</sup> Pasukan siber tersebut berupaya sedemikian rupa untuk menenggelamkan konten-konten yang berlawanan seraya mendominasi pembahasan di ruang publik digital. Proses manipulasi opini publik digital ini melibatkan berbagai akun, baik asli, palsu (*cyborg*), maupun otomatis (*robot*).<sup>16</sup> Kini, kita juga mengenal *buzzer* politik yang memodifikasi informasi untuk mencapai target politis dari pihak yang menungganginya. Pengerahan *buzzer* adalah racun bagi ruang publik, memperkuat fenomena *echo chambers* dan polarisasi diskursus publik.<sup>17</sup> Secara praktis, fenomena *buzzer* politik ini berdaya membajak ruang publik demokrasi untuk sekadar menjadi ranah komersial dan pertarungan hegemoni. Tidak dapat dielakkan bahwa pasukan siber bentukan rezim ini mengalahkan intelektual organik di ruang publik digital. Kekuasaan oligarkis yang mengendalikan internet dan ruang publik digital sudah jelas menjadi penentu arah dan masa depan masyarakat Indonesia. Opini *demos* tidak lebih dari suara-suara sumbang, dianggap tidak bermanfaat dan tidak diperlukan. Maka, opini publik tidak lagi mencerminkan aspirasi otentik masyarakat warga, melainkan merupakan hasil ‘manufakturisasi’ para elit media yang berkolaborasi dengan para elit pasar dan birokrasi.<sup>18</sup> Proses penguatan argumentasi di ruang publik pun menjadi hilang. Akibat lanjutannya ialah terjadi penggiringan opini dan propaganda yang disebarkan secara masif. Masyarakat pun rentan mempercayai kebohongan dan propaganda itu sebagai kebenaran. Akhirnya, masyarakat sendirilah yang menjadi korban melalui terbentuknya produk Undang-Undang dan kebijakan-kebijakan politik yang tidak menjawab kepentingan umum.

*Kedua*, ketiadaan oposisi dan masyarakat sipil yang lemah. Dekadensi demokrasi Indonesia hari-hari ini ditandai pula oleh matinya oposisi dan masih setengah hatinya publik mendukung demokrasi. Ketidadaan oposisi dan pelemahan sistematis masyarakat sipil semakin memperkuat watak otoriter dari kekuasaan. Ada kalimat yang menyimpulkan keadaan ini: “*oposisi hilang, tirani datang*”.<sup>19</sup> Kenyataan ini justru menjadi bumerang bagi demokrasi yang berjalan tanpa adanya kekuatan penyeimbang, *checks and balances*. Kekuasaan terpusat ini cenderung represif, intimidatif, berwatak otoriter dan dengan segala cara berupaya meredam suara-suara kritis warga. Kekuasaan yang totaliter selalu berkecenderungan tidak menginginkan rakyatnya menjadi cerdas dan kuat. Rezim cenderung mempertahankan kekuasaannya dengan membiarkan rakyatnya tetap inferior. Thomas Power berpendapat bahwa di akhir masa periode pertama pemerintahannya, Jokowi semakin mempraktikkan represi dan pelemahan terhadap oposisi

<sup>15</sup> Wijayanto, dkk *Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi: Refleksi 2020, Outlook 2021* (Depok: Penerbit LP3ES, 2021), hlm. 83.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>17</sup> Otto Gusti Madung, *op.cit.*, hlm. 897.

<sup>18</sup> F. Budi Hardiman, “Komersialisasi Ruang Publik Menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas”, *op.cit.*, hlm. 195.

<sup>19</sup> Didik J. Rachbini, *Kata Pengantar* dalam Wijayanto dkk, *Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi: Refleksi 2020, Outlook 2021* (Depok: Penerbit LP3ES, 2021), hlm. vii.

politik dengan cara yang lebih terbuka.<sup>20</sup> Ketika penguasa telah berhasil memberangus suara kritis dan membentuk komposisi politik yang gemuk, pihaknya akan lebih mudah untuk melakukan manipulasi regulasi, bahkan upaya pelemahan terhadap tatanan hukum. Pada akhirnya, rezim akan merasa benar sendiri, menganggap perlakuannya sebagai kebenaran atau sudah dianggap sesuai dengan etika bernegara. Pemerintah dengan kekuasaan mayoritas, sudah menunjukkan perangai dengan cenderung mengabaikan aspirasi publik dan suara-suara kritis progresif. Padahal, pada dasarnya, oposisi itu penting sebagai kontrol dan kritik sebab secara psikologis, para penguasa sebetulnya hanya ingin memperluas dan mempertahankan kekuasaannya, sekalipun mereka bicara banyak soal keberpihakan kepada rakyat.<sup>21</sup> Bagaimana pun, oposisi amat penting dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi seperti di Indonesia. Jika oposisi diredam, dijinakkan atau dimasukkan ke dalam lingkaran kekuasaan sebagaimana yang dipraktikkan Presiden Joko Widodo, iklim demokrasi menjadi tidak stabil dan kekuasaan oligarkis semakin bertumbuh subur.

*Ketiga*, penjinakan intelektual dan pembungkaman kebebasan akademik. Kini, telah lumrah terjadi dalam proses politik demokrasi Indonesia, yakni rezim mengatur, menguasai dan bahkan mengintervensi otonomi kampus. Penguasaan tersebut terjadi melalui praktik penjinakan intelektual dan serangan terhadap kebebasan akademik. Untuk konteks Indonesia, praktik penjinakan intelektual terjadi dalam beragam cara, dari yang sifatnya represif, hingga pendisiplinan, ideologisasi dan pemasangan karir akademik.<sup>22</sup> Kampus dan kerja-kerja intelektualnya dijinakkan rezim agar tidak perlu kritis, apalagi sampai mengguncang kemapanan kursi kekuasaan. Kampus didesain padat dengan penjara tetek-bengek administratif yang dilebih-lebihkan. Akhirnya, kampus tidak lebih dari hanya sekadar sebagai instrumen bagi kekuasaan untuk melegitimasi pengaruh dan kepentingan parsialnya. Alih-alih menjadi penjaga marwah kebenaran atau benteng kebebasan, kampus dan selubung akademisnya tak jarang hanya jadi pelumas kepentingan mapan penguasa birokrasi kampus dan rezim berkuasa.<sup>23</sup> Akademisi telah tersubordinasi dan terkooptasi oleh kekuasaan oligarkis yang mengakibatkan hilangnya privilese atau taring sebagai pembela hak-hak warga. Kebebasan akademik sebenarnya belum sepenuhnya menjadi tradisi dunia kampus kita. Sebaliknya, budaya feodalisme, praktik rebutan jatah jabatan dan politisasi birokrasi hingga brokerisme intelektual masih marak, untuk sekadar melayani kekuasaan oligarkis.<sup>24</sup> Serangan kebebasan akademik ini paralel dengan sempitnya ruang kritis masyarakat sipil dan pelemahan oposisi. Hal ini dapat memberi peluang bagi tumbuhnya otoritarianisme kekuasaan. Tak dapat dielakkan bahwa fenomena yang amat memprihatinkan ini juga turut menumbuhkan akademisi pragmatis dan oportunistis. Maksudnya, mereka tidak lagi menjunjung tinggi profesionalitas yang mestinya berpijak pada kebenaran, tetapi lebih mementingkan kepentingan parsial kelompok, termasuk penguasa dan oligarki.

---

<sup>20</sup> Thomas P. Power, "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54 (3), 2018, hlm. 320.

<sup>21</sup> Peter Tan, *Paradoks Politik: Pertautannya dengan Agama dan Kuasa di Negara Demokrasi* (Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2018), hlm. 22.

<sup>22</sup> Herlambang P. Wiratraman, "Penjinakan Intelektual dan Serangan terhadap Kebebasan Akademik", dalam Wijayanto, dkk (eds.), *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia* (Depok: LP3ES, 2021), hlm. 724.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 717.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 722.

Selain itu, kita sedang menyaksikan gejala matinya kepakaran dan anti-intelektualisme yang merupakan lonceng baru matinya demokrasi.

Berdasarkan uraian tentang dominasi kekuasaan oligarkis di atas, menjadi jelas bahwa ruang publik demokrasi Indonesia bukan lagi terutama merupakan arena pembentukan keadaban publik, melainkan sekadar menjadi ranah komersial dan pemenuhan kepentingan kekuasaan. Tidak ada lagi ruang kebebasan berpendapat, di mana terjadi pertarungan argumentasi. Demokrasi tanpa argumentasi yang berpijak pada kebenaran adalah tirani mayoritarian yang justru sedang dihidupi kekuasaan oligarkis di Indonesia.<sup>25</sup> Masyarakat politik yang memiliki hak sebagai warga negara, kini menjelma masyarakat tontonan. Isu-isu politik diganti dengan kemasam citra dan komersialisasi dan menggiring massa untuk menerimanya sebagai kebenaran. Akibatnya, tidak tumbuh nilai-nilai kewargaan, kesetaraan dan perjuangan pada kepentingan umum, tetapi komodifikasi. Kinerja dan arah ruang publik ke depan juga kian tergantung pada sejauh mana ia mendatangkan laba (*profitable*), dapat dijual (*saleable*), dan dapat diperjualbelikan (*marketable*).<sup>26</sup> Jadi akses kita ke ruang publik bukan lagi sebagai warga negara melainkan hanya sebagai penonton yang dibutuhkan sejauh menguntungkan pihak penguasa atau melayani kepentingan borjuasi. Situasi semacam ini mengisyaratkan bahwa kebenaran menjadi komoditas yang dapat diklaim oleh rezim yang berkuasa dengan mengatakan “faktanya”, “ini nyata” sehingga menciptakan distorsi. Hal ini pulalah yang menyebabkan matinya demokrasi.

### **Perlawanan Masyarakat Warga dan Upaya Terus-Menerus Mencari Kebenaran**

Kekuasaan oligarkis akan selalu mengendalikan proses demokrasi di Indonesia. Ia sudah semakin berakar dan mendarah daging dalam sistem politik kita. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada secercah harapan bagi tumbuhnya demokrasi yang lebih bermartabat di masa depan. Komitmen menjaga marwah demokrasi selalu ada dan muncul perlawanan dari mana-mana, terutama untuk menentang semakin kuatnya kekuasaan oligarkis. Masalahnya adalah perlawanan itu masih terfragmentasi dan tidak cukup terkonsolidasi dengan baik. Oleh karena itu, urgen untuk membangun sinergi dan rantai ekuivalensi di antara berbagai kelompok progresif. Ini harus menjadi agenda bersama di masa depan. Sebab, ujung-ujungnya demokrasi Indonesia bergantung pada warga negara Indonesia itu sendiri. Tidak ada satu pemimpin yang bisa menyelamatkan demokrasi. Demokrasi adalah usaha bersama. Nasibnya bergantung pada kita semua.<sup>27</sup> Dengan demikian, dalam konteks ini kita berjuang untuk melawan kekuasaan oligarkis sebagai musuh bersama (*common enemy*) dan menggagalkan tendensi otoritarian negara yang terus-menerus berjuang melanggengkan kekuasaan.

Tugas paling pertama dari masyarakat warga dan kelompok prodemokrasi agar dapat melakukan gerakan secara jernih tanpa intervensi kekuasaan ialah melepaskan diri dari jeratan kekuatan oligarkis yang sudah sedemikian membelenggu. Gerakan tersebut harus dijalankan secara profesional tanpa menunggangi kepentingan kelompok tertentu, sebab, masyarakat warga adalah katalisator kepentingan

<sup>25</sup> Otto Gusti Madung, *op.cit.*, hlm. 896.

<sup>26</sup> Herry Priyono, “Menyelamatkan Ruang Publik”, dalam dalam F. Budi Hardiman, *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hlm. 383.

<sup>27</sup> Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*, penerj. Zia Anshor (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 203.

warga. Dengan itu, kita membentuk perjuangan demokratik baru yang dapat menjadi kekuatan antagonistik terhadap sistem-sistem kekuasaan yang menindas dalam masyarakat. Bagi Chantal Mouffe dan Ernesto Laclau, perjuangan-perjuangan demokratik baru itu mesti dipahami sebagai gerakan-gerakan melawan modus-modus penindasan baru dalam masyarakat kapitalisme maju.<sup>28</sup> Semua pihak yang berkehendak baik dapat menyatukan kualitas, menjadi warga negara kompeten yang mampu meningkatkan daya tawar politik menghadapi oligarki dan membentuk transformasi politik yang lebih baik. Kekuatan itu dapat dibangun di antara para aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media independen dan masyarakat sipil. Eksistensi kelompok kritis yang mampu menjalankan fungsi *checks and balances* terhadap kekuasaan oligarkis tak dapat disangkal menjadi *sine qua non* yang akan memastikan demokrasi berjalan secara sehat, berkualitas dan bermartabat.<sup>29</sup> Namun, harus diingat bahwa kekuatan kolektif tersebut perlu dimobilisasi secara terstruktur agar sesuai dengan design demokratis dan dijalankan tanpa kekerasan.<sup>30</sup> Perlawanan ini tidak boleh membentuk persoalan baru yang lebih parah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semua orang tanpa kecuali mesti terlibat dalam perlawanan ini. Sebab, segenap warga negara memiliki kapasitas dan tanggung jawab yang sama merawat keutuhan bangsa. Berkenaan dengan itu, Antoni Gramsci menulis refleksinya sebagai aktivis demikian: “setiap orang adalah filsuf, intelektual dan legislator”. Refleksi Gramsci ini dijelaskan Iwan Pirous sebagai berikut:

Maksudnya adalah kapasitas seseorang sebagai intelektual dapat dibentuk ditempat-tempat kerjanya asalkan dibentuk secara terorganisasi. Intelektualitas tidak ditandai dalam bentuk pikiran ruwet, tetapi pikiran esensial yang jernih yang dapat diikuti akal sehat setiap orang melalui organisasi dan gerakan sosial yang beraneka ragam. Dalam kondisi ini, rakyat yang terorganisasi menjadi petarung sekaligus pemikir yang memiliki kecerdasan sipil dan daya tawar tinggi terhadap penguasa sebagai bagian dari masyarakat madani yang tangguh.<sup>31</sup>

Pesannya jelas, segenap masyarakat warga, tanpa kecuali harus berjuang bersama mengembalikan demokrasi yang telah lama dikooptasi oleh kekuasaan oligarkis. Perjuangan itu bisa dijalankan di mana saja; baik di rumah, tempat kerja, kampus, jalan dan ruang-ruang diskusi. Hanya rakyat sendirilah yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk membawa demokrasi ini ke jalan yang benar. Kita tidak dapat lagi mengharapkan peran strategis para pemimpin yang terpilih secara demokratis, sebab selalu ada tendensi bagi timbulnya praktik-praktik yang hanya memperluas dan mempertahankan kekuasaan. Walaupun kekuasaan oligarkis selalu menindas dan mengkooptasi ruang publik kehidupan berdemokrasi, masyarakat warga harus tetap berjuang tanpa kenal lelah untuk melakukan perlawanan. Kita pun mengharapkan gerakan-gerakan progresif-emansipatif-intelektual dari kampus-kampus untuk mengawasi dengan kritik dan menyampaikan seruan moral dan etika. Di samping itu, kita menanti munculnya media-media yang kritis dan independen yang tidak mudah diintervensi kekuasaan dan senantiasa berkomitmen

---

<sup>28</sup> Daniel Hutagalung, “Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural: Membaca Laclau dan Mouffe”. Pengantar dalam Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru* (Yogyakarta: Resist Book, 2008), hlm. 15.

<sup>29</sup> Masdar Hilmy, “Darurat Masyarakat Sipil”, *Kompas*, 28 Februari 2024, hlm. 7.

<sup>30</sup> Ferdinandus Jehalut, *Paradoks Demokrasi: Telaah Analitis dan Kritik atas Pemikiran Chantal Mouffe* (Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2020), hlm. 91.

<sup>31</sup> Iwan Meulia Pirous, “Membangun Nilai Budaya Perlawanan Intelektual”, *Kompas*, 6 Februari 2024, hlm. 6.

untuk memperjuangkan kebenaran. Komitmen dan daya juang sebagai warga negara kompeten itulah yang harus dirawat agar perlawanan itu berhasil. Perjuangan itu pun menjadi lebih mulia dan bermartabat, ketika masyarakat warga tetap berdiri kokoh pada nilai-nilai demokrasi, merawat keadaban publik dan berkomitmen pada akal sehat, moralitas dan etika bernegara.

Terhadap fenomena instrumentalisasi media massa, matinya oposisi dan penjinakan intelektualisme kampus yang diuraikan dalam karya ini, perlawanan masyarakat warga diharapkan menghasilkan otonomitas media, yakni terbebas dari kooptasi kekuasaan dan terbentuknya regulasi penyelenggaraan media. Media harus menjalankan fungsi bagi pelayanan publik dalam alam demokrasi. Media massa merupakan wahana yang memberi ruang diskursif dan argumentatif bagi warga negara. Di dalamnya masyarakat warga dapat membentuk opini publik sebagai bagian dari aspirasi otentiknya dalam mengawal jalannya proses politik demokrasi. Selain itu, perlawanan itu harus bermuara pada kesediaan pemerintah membuka ruang kebebasan berpendapat dan ekspresi, sehingga tidak terjadi lagi pelemahan terhadap pengaruh oposisi dan suara kritis warga. Hal ini menjadi penting dan mendesak, sebab pada dasarnya demokrasi memberi ruang bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mengekspresikan diri secara bebas. Kemudian, dengan terbuka lebarnya ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut, kerja-kerja intelektual kampus juga dapat berkembang dengan baik dan memberi kontribusi bagi jalannya demokrasi ke arah yang lebih baik dan berkualitas. Para tataran ini, para akademisi kampus dapat menjadi lebih otonom dan pastinya menghasilkan penelitian-penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan demokrasi. Atas semuanya itu, proses pencarian dan diskursus kebenaran dapat tercipta, yang menjadi ciri khas dari sebuah negara demokratis.

Hemat penulis, perlawanan terhadap kekuasaan oligarkis yang cenderung memonopoli kebenaran harus dilengkapi juga dengan komitmen masyarakat warga untuk peduli dan mencari kebenaran. Kebenaran bukan perkara menerima atau mengakui begitu saja rumusan baku dari kelompok kuat. Menurut Sokrates, kebenaran bersifat tidak terbatas, sering tak ada jawaban pasti, dan penemuan yang diperoleh pencari selalu bersahabat dengan kebingungan yang masih terasa. Kebenaran tak dapat “dimiliki”, atau dikurungkan dalam bahasa tertentu, karena bahasa mana pun serba terbatas. Namun, jika kita berupaya dengan keras dan berjuang terus-menerus, kebenaran akan tampak dalam kehidupan kita.<sup>32</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan kerelaan untuk melepaskan keyakinan-keyakinan yang membelenggu, kegigihan untuk melampaui horizon yang membatasi dan keterbukaan terhadap penyingkapan kebenaran yang wajahnya berada di seberang pemikiran dan tidak pernah selesai dikenali.<sup>33</sup> Berkenaan dengan itu, memang diperlukan keberanian untuk berpikir. Maka, pada saatnya warga negara tidak mudah percaya begitu saja kebenaran yang diklaim dan dipaksakan oleh kekuasaan oligarkis yang digerakkan secara masif melalui instrumentalisasi media massa, pelemahan oposisi dan suara kritis serta penjinakan intelektual dan serangan terhadap kebebasan akademik.

---

<sup>32</sup> John Mansford Prior, “Kata Pengantar” dalam Silvester Ule, *Melakukan Teologi di Abad Plural: Metode Bernard Lonergan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2015), hlm. xi.

<sup>33</sup> F. Budi Hardiman, *Kebenaran dan Para Kritikusnya: Mengulik Idea Besar yang Memandu Zaman Kita* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2023), hlm. 264.

Setiap warga negara memiliki daya dan tanggung jawab untuk mencari kebenaran yang memandu jalannya demokrasi. Proses demokrasi harus didukung pula oleh terciptanya ruang pertarungan wacana dan argumentasi tanpa ada yang mengklaim berada pada posisi benar dan yang lain salah. Ruang publik yang etis adalah basis untuk menumbuhkan demokrasi yang sehat tanpa kooptasi para oligark dan penguasa. Dengan demikian, masyarakat warga bisa berdiskursus secara kreatif dan rasional. Mereka dapat mengikuti diskursus kebenaran yang membantu mereka menjadi lebih kritis dan berhati-hati dengan klaim-klaim kebenaran yang diucapkan siapa pun dan dari sumber mana pun.<sup>34</sup> Masyarakat warga yang komunikatif ini pada gilirannya turut berkontribusi dalam menentukan arah kehidupan bernegara dan menggagalkan setiap upaya banal pemerintah mengkooptasi ruang publik demokrasi. Selain itu, baik warga biasa maupun penguasa harus meredam setiap subjektivitas paham kebenaran dan absolutisme tentang kebenaran. Penguasa tidak bisa mengurung atau mengklaim kebenarannya sendiri dan diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat. Kesetaraan dalam ruang lingkup demokrasi mengandaikan bahwa tak ada pemegang kebenaran tunggal dalam demokrasi dan setiap orang dalam iklim kebebasan dapat berdebat untuk mencari kebenaran.<sup>35</sup> Agar kebenaran bersemi dalam praktek politik demokrasi di Indonesia, iklim kebebasan berpendapat dan kritisisme harus dijamin. Dengan demikian, terbentuklah ruang publik yang memungkinkan warga negara untuk menyatakan sikap secara terbuka menggunakan kekuatan argumentasi dan melakukan perlawanan secara terstruktur dan sistematis. Kiranya masyarakat warga yang dijiwai rasionalitas komunikatif memiliki daya untuk memberi nyawa kembali kepada ruang publik yang tercekik oleh himpitan pasar dan birokrasi. Mari terus berjuang untuk membebaskan dan menyelamatkan demokrasi dari jurang otoritarianisme. Akhirnya, melalui gerakan perlawanan tersebut dan kesediaan mencari serta terlibat dalam diskursus kebenaran, masyarakat warga memberi kontribusi bagi penguatan demokrasi.

### **Penutup**

Demokrasi Indonesia telah lama didominasi oleh kekuasaan oligarkis. Demokrasi yang seharusnya menghidupi spirit pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, justru dikooptasi oleh kekuasaan oligarkis yang sudah sedemikian membelenggu. Sebagaimana dijelaskan dalam tulisan ini, dominasi itu terjadi melalui instrumentalisasi media massa, pelemahan oposisi dan masyarakat sipil, penjinakan intelektual dan pembungkaman kebebasan akademik. Kekuasaan oligarkis dalam sistem politik demokrasi di Indonesia ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu urgen untuk membentuk perlawanan masyarakat warga yang kiranya terorganisasi secara terstruktur dan sistematis. Ini merupakan salah bentuk tanggung jawab warga negara untuk mengembalikan demokrasi yang sedang pincang dan bersama-sama berkomitmen menjaga kewarasan bernegara. Perjuangan tersebut harus dilengkapi dengan kesediaan untuk selalu mencari kebenaran dan terlibat dalam diskursus kebenaran agar semakin kritis dan lebih berhati-hati terhadap klaim-klaim kebenaran penguasa.

---

<sup>34</sup> F. Budi Hardiman, *Kebenaran dan Para Kritikusnyanya*, *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>35</sup> Otto Gusti Madung, *op.cit.*, hlm. 895.

## Daftar Pustaka

- Dosi, Eduardus. *Media Massa dalam Jaring Kekuasaan: Sebuah Studi tentang Relasi Kekuasaan di Balik Wacana*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2012.
- Hardiman, F. Budi. *Dalam Moncong Oligarki, Skandal Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013.
- . "Komersialisasi Ruang Publik Menurut Hannah Arendt dan Jurgen Habermas", dalam F. Budi Hardiman, *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- . *Kebenaran dan Para Kritikusnya: Mengulik Idea Besar yang Memandu Zaman Kita*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2023.
- Haris, Syamsuddin. *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.
- Haryanto, Ignatius. "Monopoli Media dan Runtuhnya Independensi Jurnalistik", dalam AE Priyono dan Usman Hamid (ed.), *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Hilmy, Masdar. "Darurat Masyarakat Sipil", *Kompas*, 28 Februari 2024.
- Hutagalung, Daniel. "Hegemoni dan Demokrasi Radikal-Plural: Membaca Lacalu dan Mouffe". Pengantar dalam Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, *Hegemoni dan Strategi Sosialis: Postmarxisme dan Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- Jehalut, Ferdinandus. *Paradoks Demokrasi: Telaah Analitis dan Kritik atas Pemikiran Chantal Mouffe*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2020.
- . "Oligarki dan Paradoks Demokrasi di Indonesia", *Akademika*, 14:1 (Ledalero: Agustus-Desember 2018), hlm. 20.
- Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati: Apa yang Diungkapkan Sejarah tentang Masa Depan Kita*, penerj. Zia Anshor. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Liddle, R. William. "Pengantar: Mengukur Demokrasi Indonesia", dalam Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (ed.), *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat*. Bandung: Mizan, 2001.
- Madung, Otto Gusti. "Demokrasi dan Kebenaran", dalam Wijayanto, dkk (eds.), *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. Depok: LP3ES, 2021.
- Pirous, Iwan Meulia. "Membangun Nilai Budaya Perlawanan Intelektual", *Kompas*, 6 Februari 2024.
- Power, Thomas P. "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54 (3), 2018, hlm. 320.
- Prior, John Mansford. "Kata Pengantar" dalam Silvester Ule, *Melakukan Teologi di Abad Plural: Metode Bernard Lonergan*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.
- Priyono, Herry. "Menyelamatkan Ruang Publik", dalam dalam F. Budi Hardiman, *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Rachbini, Didik J. *Kata Pengantar* dalam Wijayanto dkk, *Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi: Refleksi 2020, Outlook 2021*. Depok: Penerbit LP3ES, 2021.
- Susabun, Anno. "Politik Demokrasi Kapitalistik dan Bahaya Instrumentalisasi Media Massa" , *Biduk* Edisi I. LXX. Juli-Desember 2016, hlm. 25.
- Tan, Peter. *Paradoks Politik: Pertautannya dengan Agama dan Kuasa di Negara Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Gunung Sopai, 2018.
- Warburton, Eve dan Edward Aspinall, "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion", *Contemporary Southeast Asia*, 41, 2019, hlm. 261.

(Arsenius Nega)

Winters, Jeffrey A. "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia", dalam AE Priyono dan Usman Hamid (ed.), *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca-Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

------. *Oligarki*, penerj. Zia Anshor. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Wijayanto, dkk *Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi: Refleksi 2020, Outlook 2021*. Depok: Penerbit LP3ES, 2021.

Wiratraman, Herlambang P. "Penjinakan Intelektual dan Serangan terhadap Kebebasan Akademik", dalam Wijayanto, dkk (eds.), *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia*. Depok: LP3ES, 2021.